

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran kepemimpinan pendidikan Kristen dalam memimpin pendidikan tinggi menjadi sentral kajian terkait pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi lembaga. Karena tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud dari salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pendidikan tinggi sebagai wadah yang bertanggung jawab mengembangkan dan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif dan professional dalam bidang keilmuannya. Siburian menyatakan bahwa peran kepemimpinan pendidikan Kristen adalah memengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan semua tenaga kependidikan dan pendidik untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.¹ Peran kepemimpinan pendidikan Kristen dalam memimpin pendidikan tinggi merupakan komponen kunci dalam menghasilkan tata kelola lembaga dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan tinggi.

Mutu pendidikan tinggi menjadi syarat utama dalam memenuhi tuntutan untuk menghasilkan SDM yang siap pakai dalam dunia kerja. Oleh karena itu, dosen-dosen dituntut untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme dalam melaksanakan tri dharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan karakter mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan professional dalam pembangunan nasional. Pasal 1 ayat 9 UU Dikti menyatakan bahwa tri dharma

¹Hendro Hariyanto Siburian, *Pentingnya Model Kepemimpinan dalam Pendidikan Kristen Masa Kini*. <https://osf.io/ujk3r/download>. Diakses, 21 April 2023.

Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai tugas utama dosen pada setiap semester sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.² Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dikokohkan oleh pasal 24 ayat 2 UU Sisdiknas, bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai kewajiban yang harus diterapkan dengan baik untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.³ Pelaksanaan tri dharma merupakan kunci utama dalam mengembangkan manajemen akademik maupun non-akademik, dalam menghasilkan SDM yang unggul, kompetitif dan profesional pada skala nasional maupun global. Dengan demikian, untuk menghasilkan pelaksanaan tri dharma yang sesuai dan bahkan melampaui SN Dikti, diterapkan siklus manajemen mutu SPMI Dikti yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) agar tercipta budaya mutu yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 50 ayat (6) mengatur pengembangan budaya mutu di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti),⁴ Selanjutnya ditegaskan pasal 53 UU Dikti bahwa SPM Dikti terdiri atas: a). SPMI yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b). SPME yang dilaksanakan melalui akreditasi.⁵ Akreditasi atau SPME Dikti untuk mencapai standar minimal dan atau melampaui Standar

²Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 9.

³ Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 24 ayat 2.

⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 50 ayat (6).

⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pasal 53

Nasional Pendidikan tinggi (SN Dikti). SPMI Dikti merupakan sistem yang diterapkan untuk mengontrol mutu pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Frits menyatakan bahwa mekanisme implementasi SPMI Dikti melalui pelaksanaan siklus manajemen mutu SPMI yaitu Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti.⁶ Standar mutu Dikti telah diatur dalam pasal 54 UU Dikti bahwa standar mutu yang digunakan di dalam SPMI Dikti adalah Standar Dikti yang meliputi SN Dikti ketetapan Menteri, dan Standar Dikti ketetapan perguruan tinggi yang mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar Dikti ketetapan perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar bidang akademik dan bidang non-akademik yang harus melampaui SN Dikti ketetapan Menteri berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti.⁷ Ni Handayani dan Muliastri Implementasi SPMI Dikti dan PPEPP merupakan bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Selanjutnya Handayani dan Muliastri menjelaskan bahwa penetapan standar dan mekanisme penjaminan mutu merupakan kewenangan lembaga pendidikan, yang menetapkan langkah-langkah penting untuk mengukur kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan.⁸ Pemimpin pendidikan tinggi diberikan wewenang penuh oleh

⁶ Frits Gerit dan John Rupilele, 'Pemanfaatan Sistem Monitoring Kegiatan Tri Dharma PT. Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Victory Sorong.', *Jurnal J-DEPACE*, 1.1 (2018), 55–65.

⁷ *Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*

⁸ Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, 'Determinasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi.', *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 6.2 (2021), 110 -120.

konstitusi untuk melaksanakan tata kelola lembaga untuk mencapai visi dan misi pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif dan profesional pada bidang keilmuannya.

Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI Dikti) menjabarkan bahwa prinsip otonomi perguruan tinggi memberi otoritas kepada pimpinan pendidikan tinggi untuk menerapkan siklus manajemen mutu yaitu PPEPP dalam kegiatan penjaminan mutu secara mandiri, agar menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan.⁹ Tujuan penetapan standar mutu oleh pimpinan untuk menemukan langkah-langkah praktis dalam mengukur tingkat pencapaian mutu pendidikan tinggi sesuai SN Dikti atau melampaui dan mampu mempertahankannya secara berkelanjutan. Peran kepemimpinan untuk pelaksanaan tata kelola lembaga pendidikan tinggi dan tri dharma perguruan tinggi sesuai SN Dikti agar meningkatkan hasil akreditasi program studi dan institusi pendidikan tinggi.

Ach. Chairy yang mengatakan bahwa ada dua kegiatan utama sebagai kunci penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu penetapan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan tinggi, karena kualitas pendidikan tinggi harus direncanakan, dicapai, dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten dan

⁹ Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, Teknologi, & Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran & Kemahasiswaan, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Pendidikan Akademik - Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh.*, 2018.

berkelanjutan.¹⁰ Pemimpin mengimplementasikan siklus manajemen mutu di lembaga pendidikan tinggi yang pimpinannya dengan cara membuat kebijakan penetapan standar mutu, kebijakan pelaksanaan penetapan mutu, kebijakan evaluasi pelaksanaan mutu, kebijakan pengendalian mutu dan kebijakan peningkatan mutu. Terkhususnya evaluasi pelaksanaan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui sistem Audit Mutu Internal (AMI) untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi agar memenuhi dan bahkan melampaui SN Dikti yang telah ditetapkan.

Rahminawati mengatakan pelaksanaan proses tata kelola pendidikan berjalan lancar, karena fungsi pengawasan dan evaluasi oleh kepemimpinan pendidikan diterapkan mulai dari perencanaan dan pengelolaan secara ketat pada setiap tahun.¹¹ Penerapan SPMI Dikti dalam tata kelola tri dharma perguruan tinggi dimulai dari perencanaan dan terus dievaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Peran SPMI Dikti untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara mandiri, berkualitas dan berkelanjutan. Lebih lanjut Ni Nyoman menyatakan bahwa dalam melaksanakan penjaminan mutu internal, lembaga pendidikan tinggi harus mengadakan evaluasi internal, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.¹² Evaluasi pelaksanaan SPMI Dikti melalui penerapan Audit Mutu Internal (AMI) bertujuan untuk menjaga standar mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Lebih lanjut Ni Nyoman menyatakan bahwa parameter dan metode evaluasi hasil

¹⁰ Ach. Chairy dan Arinda Firdianti, 'Peran Kepemimpinan Dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.', *Tafahus Jurnal Pengkajian Islam*, 1.2 (2021), 113–124.

¹¹ Nan Rahminawati, 'Sistem Penjaminan Mutu Nternal Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah Dasar.', *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4.3 (2021), 212–19.(2021).

¹²Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, 110-120

ditentukan pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misinya. Dalam menjalankan SPMI Dikti, harus melakukan evaluasi internal, karena evaluasi dilaksanakan untuk mengusahakan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.¹³ Visi dan misi lembaga pendidikan tinggi menjadi patokan evaluasi standar mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi SPMI Dikti oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Ferlis dan Syafaruddin mengatakan bahwa dalam pengendalian pelaksanaan SPMI, ditemukannya beberapa kekurangan agar diadakan tindakan perbaikan atau koreksian.¹⁴ Sedangkan Ngindana dkk., mengatakan sistim pengendalian dalam pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi, terdapat beberapa sistem dan tindakan, yaitu: 1) penjaminan mutu melalui Audit Mutu Internal; 2) Lakukan dengan benar; 3) Jaminan kepuasan pelanggan; (4) Mendengar dan merekam pengaduan pemangku kepentingan; 5) Manajemen berbasis fakta; 6) Perbaikan yang berkelanjutan¹⁵ Pengendalian mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dikendalikan melalui implementasi SPMI dan AMI untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Yuyun menyatakan akreditasi adalah bentuk penilaian (assessment) terhadap mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi atau program studi oleh organisasi atau badan independen di luar lembaga pendidikan tinggi.¹⁶ Sedangkan Meriohengki dan Wahyudi menegaskan bahwa akreditasi sebagai upaya pemerintah untuk

¹³ Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, 120

¹⁴ Muhammad Ferlis dan Syafaruddin, *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju*, Jurnal Competitiveness, 9, 1 (2020), 21-36

¹⁵ Rispa Ngindana, Langgeng Rachmatullah Putra, & Rinaldo Albertus. *Analisa Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Untuk Mewujudkan Good University Governance*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, 2, 2 (2020), 152-159

¹⁶ Yuyun Yulianingsih, *Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Islam, 5, 1 (2015), 92-116.

melakukan standarisasi dan menjamin kualitas pendidikan tinggi bagi alumni sehingga kualitas lulusan antara pendidikan tinggi tidak terlalu variatif dan kebutuhan kerja yang memadai.¹⁷ Lebih lanjut Meriohengki dan Wahyudi menyatakan tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah:

- 1). Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi mutu yang ditetapkan pemerintah pada SN Dikti melalui hasil akreditasi, sebagai perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria.
- 2). Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas.
- 3). Menjadi bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari instansi yang berkepentingan.¹⁸

Akreditasi program studi sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa perguruan tinggi sudah memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, akreditasi program studi dan institusi pendidikan tinggi merupakan upaya pemerintah untuk menyetaraan tata kelola dan kualitas pendidikan pada program studi dan institusi pendidikan tinggi termasuk Sekolah Tinggi teologi (STT).

Imeldawati menyatakan bahwa STT harus dikelola sesuai dengan SN Dikti yang ditetapkan pemerintah. Walaupun sebagian besar STT dikelola oleh gereja atau yayasan yang terkendala SDM, dana dan sarana prasarana. Namun, tata kelola lembaga STT harus terus dimaksimalkan secara professional dan berkualitas.¹⁹ Pernyataan ini terkait dengan rendahnya peringkat hasil akreditasi program studi dan institusi STT yang sebelumnya dikelola untuk pelayanan misi dari gereja atau yayasan tanpa pelaksanaan tri dharma untuk memenuhi SN Dikti, sedangkan

¹⁷ Meriohengki, dan Mochamad Wahyudi, *Klasifikasi Algoritma Naïve Bayes dan SVM Berbasis PSO Dalam Memprediksi Spam Email Pada Hotline-Sapto*. Paradigma - Jurnal Informatika dan Komputer. 22, 1 (2020), 61-67.

¹⁸ Meriohengki, dan Mochamad Wahyudi, *Klasifikasi Algoritma Naïve Bayes dan SVM Berbasis PSO Dalam Memprediksi Spam Email Pada Hotline-Sapto*. 61-67

¹⁹ Tiur Imeldawati, *Manajemen Perguruan Tinggi Teologi*, Kerugma Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Vol. 1, No. 1. (2019), 64.

setelah pemberlakuan akreditasi maka tata kelolanya berorientasi pada pelaksanaan tri dharma yang harus mencapai SN Dikti agar terakreditasi.

Data akreditasi program studi dan institusi STT tahun 2022-2023 dari DIRJEND BIMAS Kristen Protestan Kementerian Agama²⁰ disajikan dalam table berikut:

INSTITUSI STT	2022	2023
Terakreditasi	357	357
Belum Akreditasi	26	29
Total institusi STT	383	385
PROGRAM STUDI STT	2022	2023
Terakreditasi	444	638
Terakreditasi Unggul	2	3
Terakreditasi Baik Sekali	46	65
Terakreditasi Baik	397	570
Belum terakreditasi	327	372
Total Prodi di STT	771	1.010

Sampai tahun 2019 insititusi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di Indonesia sebanyak 383 institusi, yaitu 6 institusi PTKKN dan 377 institusi PTKKS. Jumlah institusi PTKK yang terakreditasi sampai tahun 2019 sebanyak 87 institusi sedangkan yang belum terakreditasi 296. Berikut penjelasan tentang jumlah akreditasi institusi PTKK sampai tahun 2019,²¹ yaitu:

²⁰ Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, 2023.

²¹ Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, 2019, 51.

Jumlah Institusi	Akreditasi			Total Terakreditasi	Belum Terakreditasi
	A	B	C		
383	0	7	80	87	296

Sumber data: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Sampai tahun 2019 jumlah program studi di institusi PTKK sebanyak 921, dengan rincian bahwa jumlah program studi yang terakreditasi 384 dan belum terakreditasi 537 program studi, yang dijelaskan melalui tabel berikut²² ini:

Jumlah Prodi	Akreditasi			Total Terakreditasi	Belum Terakreditasi
	A	B	C		
921	1	53	330	384	537

Sumber data: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Adapun perkembangan jumlah akreditasi program studi PTKK dari Tahun 2015-2019 dijelaskan melalui tabel berikut ini, yaitu:

Akreditasi						
Prodi PTKK	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Akreditasi A	0	0	0	0	1	1
Akreditasi B	9	4	15	9	16	53
Akreditasi C	99	27	40	60	104	330
TOTAL						384

Sumber data: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

²² Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, 2019, 51.

Penjelasan perkembangan persentase program studi PTKK yang terakreditasi A/Unggul dari Tahun 2020-2022,²³ dipaparkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase prodi yang terakreditasi A/Unggul	120%	90%	20%

Sumber data: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Berdasarkan rencana program tahun 2022, Ditjen Bimas Kristen telah menargetkan program studi yang terakreditasi A/unggul sebesar 10% atau (10 program studi). PTKK memiliki sekitar 25 program studi yang diajukan ke BAN-PT untuk dinilai. Dari 25 program studi yang diajukan, hanya 2 (dua) program studi, atau 2% saja yang terakreditasi A/Unggul. Membandingkan target (10%) dengan capaian (2%), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian program studi terakreditasi A/Unggul ialah 20%.²⁴

Data tersebut menggambarkan bahwa peringkat hasil akreditasi STT-STT di Indonesia rata-rata terakreditasi Baik, artinya belum melampaui SN Dikti. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengadakan obeservasi terhadap STT-STT di kota Tangerang yaitu STT Injili Aras Tamar Jakarta, STT Pelita Dunia, STT Moriah, STT Bina Muda Wirawan, STT Presbyterian, STT Harves Internasional, STT Filadelfiah dan STT Sunargeo. Dari hasil observasi ditemukan bahwa ke 8 STT di kota Tangerang, baik itu program studi maupun institusi terakreditasi Baik (C).

²³ Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, 2022, 90-91

²⁴ Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, 2022, 90-91

selain itu ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan tri dharma di STT-STT di kota Tangerang, seperti pergeseran paradigma para dosen terhadap pelaksanaan tri dharma, keterbatasan SDM dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tri dharma, keterbatasan dana untuk honor mengajar dosen, minimnya dana untuk pelaksanaan penelitian dan PkM, dan keterbatasan sarana prasarana. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan judul penelitian untuk mengadakan penelitian mendalam tentang Peran Kepemimpinan Pendidikan Kristen Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Peringkat Hasil Akreditasi Sekolah Tinggi Teologi di kota Tangerang.

1.2 Fokus Penelitian

Merujuk dari latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Peran kepemimpinan pendidikan Kristen dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STT-STT di kota Tangerang.
- 1.2.2. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi STT-STT di kota Tangerang.
- 1.2.3. Meningkatkan peringkat hasil akreditasi program studi dan institusi di STT-STT di kota Tangerang

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam pembahasan penelitian, sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa peran kepemimpinan pendidikan Kristen dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STT-STT di kota Tangerang?
- 1.3.2. Mengapa penting pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STT-STT di kota Tangerang?

1.3.3. Bagaimana meningkatkan peringkat hasil akreditasi STT-STT di kota Tangerang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.4.1. Untuk menganalisa, mengidentifikasi dan mensintesis peran kepemimpinan pendidikan Kristen dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STT-STT di kota Tangerang

1.4.2. Untuk menganalisa, mengidentifikasi dan mensintesis pelaksanaan tata kelola tri dharma perguruan tinggi di STT-STT di kota Tangerang.

1.4.3. Untuk menganalisa, mengidentifikasi dan mensintesis meningkatkan peringkat hasil akreditasi STT-STT di kota Tangerang.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1.5.1.1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang peran kepemimpinan pendidikan Kristen dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi di STT.

1.5.1.2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pelaksanaan tata kelola tri dharma perguruan tinggi di STT.

1.5.1.3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam meningkatkan peringkat hasil akreditasi STT.

1.5.2. Manfaat Praktis

1.5.2.1. Diharapkan penelitian ini sebagai pengetahuan yang dapat diterapkan dalam peran kepemimpinan pendidikan Kristen dalam melaksanakan tata kelola pendidikan tinggi di STT.

1.5.2.2. Diharapkan penelitian ini sebagai pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tata kelola tri dharma perguruan tinggi di STT.

1.5.2.3. Diharapkan penelitian ini sebagai pengetahuan yang dapat diterapkan dalam peningkatan peringkat hasil akreditasi STT.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang kebaruan penelitian, landasan teori dari peran kepemimpinan pendidikan kristen dalam melaksanakan tata kelola pendidikan tinggi dan tri dharma perguruan tinggi di institusi STT sesuai SN Dikti, dan mempersiapkan kelengkapan pemenuhan standar akreditasi institusi dan program studi pendidikan tinggi.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi multi kasus, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, peran peneliti dan etika penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian. Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan data hasil penelitian kemudian akan menganalisis data tersebut untuk melihat kecocokan antara teori yang digunakan dalam penelitian dan temuan-

temuan di lapangan, lalu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang kesimpulan dari disertasi ini kemudian menuliskan saran-saran.

1.7. Defenisi Istilah

Istilah-istilah yang perlu didefenisikan dalam penelitian ini, ialah:

- 1.7.1 Peran kepemimpinan pendidikan Kristen di lembaga STT untuk memimpin pelaksanaan tata kelola tri dharma perguruan tinggi untuk meningkatkan peringkat hasil akreditasi STT.
- 1.7.2 Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai kegiatan utama dosen di perguruan tinggi yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 1.7.3 Akreditasi atau Sistim Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan (LAMDIK) untuk menetapkan standar mutu pendidikan tinggi.
- 1.7.4 Sekolah Tinggi Teologi (STT) adalah bagian dari perguruan tinggi keagamaan Kristen (PTKK) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi khusus keagamaan Kristen.